

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi, mobilisasi tabungan, alokasi sumber daya, dan penyediaan pembiayaan bagi kegiatan ekonomi produktif. Levine (2005) menjelaskan bahwa perkembangan sektor keuangan yang baik mampu meningkatkan efisiensi perekonomian, memperluas investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Seiring dengan perkembangan sistem keuangan global, keuangan Islam (*Islamic finance*) hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah dengan menekankan keadilan, transparansi, keterkaitan dengan sektor riil, serta mekanisme berbagi risiko (*risk-sharing*).

Berdasarkan data dari *Islamic Financial Services Board* (2025) dan LSEG *Islamic Finance Development Report* (2024), dalam beberapa dekade terakhir industri keuangan Islam mengalami pertumbuhan yang pesat dan semakin memperoleh perhatian di berbagai negara, baik negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Perkembangan tersebut ditandai oleh peningkatan aset keuangan Islam, ekspansi lembaga keuangan syariah, pertumbuhan pasar sukuk, serta semakin luasnya integrasi instrumen keuangan syariah dalam sistem keuangan global.

Meningkatnya perhatian terhadap keuangan Islam tidak terlepas dari berbagai kritik terhadap sistem keuangan konvensional, khususnya setelah terjadinya krisis keuangan global yang mengungkap berbagai kelemahan sistem

berbasis bunga, spekulasi, dan aktivitas keuangan yang tidak didukung oleh aset riil. Aulia (2025) dan Nisa et al. (2025) turut mengemukakan bahwa sistem keuangan Islam memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan stabilitas keuangan sekaligus memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil melalui mekanisme pembiayaan berbasis aset (*asset-based financing*) dan prinsip berbagi risiko (*risk-sharing*). Karakteristik tersebut menjadikan keuangan Islam dinilai lebih mampu mendukung aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Islam semakin terlihat ketika sistem keuangan Islam menunjukkan ketahanan yang relatif baik dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi global, termasuk selama pandemi COVID-19 pada periode 2020–2024. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sektor keuangan Islam relatif lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, serta inklusi keuangan, terutama di negara-negara berkembang dengan populasi Muslim yang besar (Batorshyna et al., 2021; Febriyansyah, 2020; Hidayanti, 2018; Mustafa et al., 2018; Wahyudi, 2025).

Peran strategis ini tercermin dari terus meningkatnya total aset keuangan Islam global yang mencakup perbankan syariah, sukuk, takaful, dana investasi syariah, dan berbagai lembaga keuangan Islam lainnya. Peningkatan aset tersebut menunjukkan semakin besarnya kontribusi sektor keuangan Islam dalam sistem keuangan global. Gambar 1.1 menyajikan perkembangan aset keuangan Islam global selama periode 2017–2024 beserta proyeksinya hingga tahun 2028



**Gambar 1. 1 Pertumbuhan Aset Keuangan Islam Global tahun 2017-2024
(Miliar USD)**

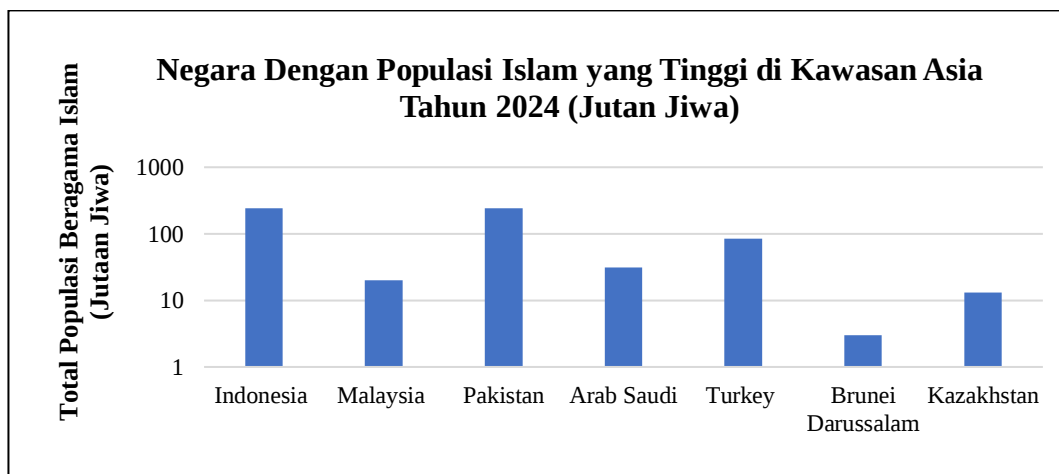
Sumber: London Stock Exchange Group (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1, sektor keuangan Islam menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan meningkatnya peran lembaga keuangan Islam dalam mendukung aktivitas ekonomi melalui berbagai instrumen pembiayaan dan investasi syariah. Perkembangan aset keuangan Islam tidak terlepas dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah, serta dukungan kebijakan dan penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh berbagai otoritas keuangan.

Selain itu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan keuangan Islam juga didorong oleh faktor demografis, meningkatnya kesadaran terhadap prinsip keuangan etis, serta semakin kuatnya dukungan regulasi dan institusi keuangan syariah (R. A. A. Hassan, 2024; Karso, 2025; Natsir et al., 2025; Sudarmi et al., 2024 ; Cintya & Alifa, 2025; Harahap, 2024; M. K. Hassan et al., 2025; Salam et al., 2025).

Secara geografis, populasi Muslim dunia terkonsentrasi di kawasan Asia dengan proporsi sekitar 58,7% atau lebih dari 1,18 miliar jiwa dari total populasi Muslim global pada tahun 2020. Sementara itu, wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara menyumbang sekitar 20,5%, sedangkan Afrika Sub-Sahara sebesar 18,2% (Hackett et al., 2025). Besarnya konsentrasi populasi Muslim tersebut menjadikan Asia sebagai salah satu pusat perkembangan ekonomi dan keuangan Islam global. Selain didukung oleh potensi pasar yang besar, kawasan ini juga menunjukkan perkembangan industri keuangan Islam yang dinamis melalui pertumbuhan perbankan syariah, pasar sukuk, dan berbagai lembaga keuangan Islam lainnya.

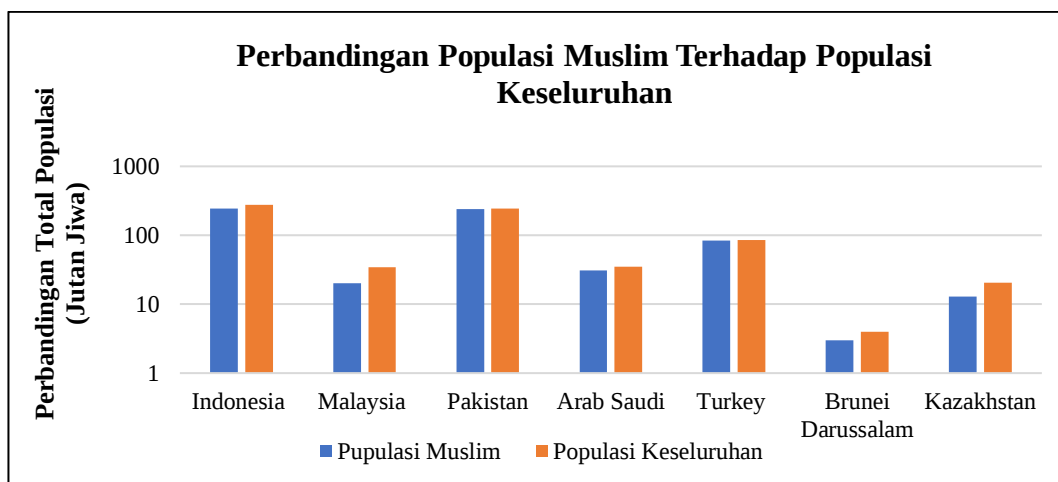
Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada kawasan Asia karena merupakan wilayah dengan populasi Muslim terbesar sekaligus salah satu pusat perkembangan keuangan Islam global. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tujuh negara dengan populasi muslim yang besar serta anggota Organisation of Islamic Cooperation (OIC), yaitu Indonesia, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Brunei Darussalam, dan Kazakhstan. Gambaran mengenai jumlah populasi Muslim pada ketujuh negara tersebut disajikan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Persebaran Populasi Muslim di Asia Tahun 2024 (Juta Jiwa)

Sumber: *World Population Review*, 2025 (data diolah)

Gambar 1.2 menunjukkan persebaran populasi Muslim di tujuh negara Muslim Asia tahun 2024. Berdasarkan data *World Population Review* (2025), Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar (sekitar 245 juta jiwa), diikuti Pakistan (240 juta jiwa). Turki dan Arab Saudi masing-masing memiliki sekitar 85 juta dan 35 juta jiwa Muslim, sedangkan Malaysia, Kazakhstan, dan Brunei Darussalam memiliki jumlah yang lebih kecil. Secara umum, distribusi populasi Muslim di negara-negara tersebut tidak merata, dengan Indonesia dan Pakistan mendominasi jumlah penduduk Muslim. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, Gambar 1.3 menyajikan perbandingan antara total populasi dan populasi Muslim di masing-masing negara.



Gambar 1. 3 Perbandingan Populasi Muslim terhadap Populasi Keseluruhan di 7 Negara Kawasan Asia Tahun 2024 (Juta Jiwa)

Sumber: *World Population Review*, 2025 (data diolah)

Gambar 1.3 menunjukkan perbandingan antara populasi Muslim dan total populasi di tujuh negara observasi berdasarkan data *World Population Review* (2025). Terlihat bahwa pada sebagian besar negara tersebut, penduduk Muslim mendominasi total jumlah penduduk. Indonesia dan Pakistan memiliki jumlah populasi Muslim terbesar dibandingkan negara lainnya, sementara di Arab Saudi,

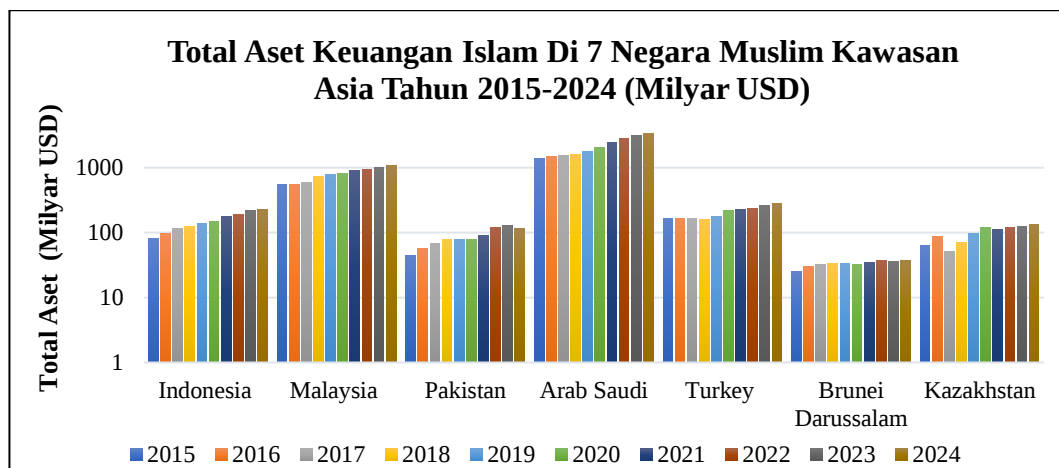
Turki, dan Brunei Darussalam, proporsi penduduk Muslim mendekati total populasi negaranya. Dominasi populasi Muslim tersebut seharusnya menciptakan potensi pasar yang besar bagi pengembangan industri keuangan Islam, mengingat semakin banyak masyarakat yang berpotensi menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perkembangan industri keuangan Islam di masing-masing negara Islam kawasan Asia juga didukung oleh berbagai kebijakan strategis yang diterbitkan oleh otoritas terkait. Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Malaysia melalui Bank Negara Malaysia, Pakistan melalui *State Bank of Pakistan*, Arab Saudi melalui *Saudi Central Bank*, Turki melalui *Central Bank of the Republic of Türkiye*, Brunei Darussalam melalui *Autoriti Monetari Brunei Darussalam*, serta Kazakhstan melalui *Astana International Financial Centre* terus memperkuat regulasi, kelembagaan, dan ekosistem keuangan syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan sektor keuangan nasional. Dengan demikian, perkembangan aset keuangan Islam pada negara-negara tersebut tidak hanya mencerminkan pertumbuhan industri secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan adanya dukungan kelembagaan dan kebijakan yang berkelanjutan dalam mendorong perkembangan *Islamic Finance*.

Untuk melihat sejauh mana potensi tersebut terwujud dalam perkembangan sektor keuangan syariah, diperlukan indikator yang mampu menggambarkan tingkat perkembangan keuangan Islam secara komprehensif. Dalam penelitian ini, *Islamic Financial Development* diukur melalui total aset keuangan Islam yang mencerminkan skala, kapasitas, dan perkembangan industri keuangan Islam suatu negara. Indikator ini menggambarkan tingkat kedalaman

keuangan (*financial depth*) serta kemampuan sektor keuangan Islam dalam menjalankan fungsi intermediasi.

Pemilihan indikator ini juga didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang mengukur perkembangan keuangan Islam berdasarkan total aset lembaga keuangan Islam, yang mencakup perbankan syariah dan berbagai lembaga keuangan lain yang menawarkan layanan keuangan berbasis syariah (Mawardi et al., 2024 ; Muhammad et al., 2024). Gambaran perkembangan total aset keuangan Islam pada tujuh negara sampel selama periode 2015–2024 disajikan pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4 Total Aset Keaungan Islam di 7 Negara Muslim Asia 2015-2024

Sumber: SESRIC 2015-2024 (data diolah)

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa perkembangan aset keuangan Islam pada tujuh negara sampel masih menunjukkan variasi yang cukup besar. Arab Saudi dan Malaysia memiliki nilai aset keuangan Islam yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara lainnya, sedangkan Indonesia, Pakistan, Turki, Brunei Darussalam, dan Kazakhstan berada pada tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan keuangan Islam di

kawasan Asia belum berlangsung secara merata meskipun seluruh negara sampel sama-sama memiliki komitmen dalam mengembangkan industri keuangan syariah.

Perbedaan tingkat perkembangan tersebut menjadi menarik untuk dicermati mengingat negara-negara yang menjadi objek penelitian merupakan negara dengan populasi Muslim yang besar. Besarnya populasi Muslim tidak selalu diikuti oleh tingkat perkembangan keuangan Islam yang sama. Indonesia, misalnya, memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, namun nilai aset keuangan Islamnya masih berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Sebaliknya, beberapa negara dengan jumlah penduduk Muslim yang relatif lebih kecil justru menunjukkan tingkat perkembangan keuangan Islam yang lebih tinggi.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa *Islamic Financial Development* tidak hanya ditentukan oleh besarnya populasi Muslim, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor kualitas lingkungan ekonomi, kelembagaan, regulasi, serta kebijakan yang berbeda pada setiap negara. Dengan kata lain, potensi pasar yang besar belum tentu secara otomatis menghasilkan perkembangan keuangan Islam yang lebih tinggi apabila tidak didukung oleh lingkungan ekonomi dan institusi yang kondusif. Temuan tersebut juga tercermin dalam berbagai penelitian terdahulu, Igyo (2025), Karadağ (2022), Lucky & Endraswati (2024), Mawardi et al. (2024), dan Muhammad et al. (2024) menunjukkan bahwa perkembangan keuangan Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar aspek demografis, seperti kebebasan ekonomi, kondisi makroekonomi, dan kualitas institusi.

Hasil-hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perbedaan tingkat *Islamic Financial Development* antarnegara tidak hanya berkaitan dengan ukuran

populasi Muslim, tetapi juga dengan kemampuan masing-masing negara dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sektor keuangan Islam.

Economic Freedom adalah suatu konsep yang memberikan hak fundamental kepada individu dan pelaku usaha untuk mengelola serta mengembangkan aktivitas ekonomi dan bisnis dengan intervensi pemerintah yang minimal. Pengukuran tingkat *economic freedom* umumnya merujuk pada Indeks *Economic Freedom* yang dikembangkan oleh *Heritage Foundation* bekerja sama dengan *The Wall Street Journal*.

Indeks ini menggunakan rentang skor 0–100 untuk menilai derajat kebebasan ekonomi suatu negara. Skor yang semakin mendekati 100 menunjukkan tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi, ditandai oleh regulasi yang efisien, perlindungan hak milik yang kuat, Lembaga hukum yang efektif, serta keterbukaan pasar yang luas. Sebaliknya, skor yang rendah (mendekati 0) mengindikasikan rendahnya tingkat kebebasan ekonomi, yang tercermin dari tingginya intervensi pemerintah, regulasi yang restriktif, lemahnya perlindungan hak milik, serta birokrasi yang tidak efisien.

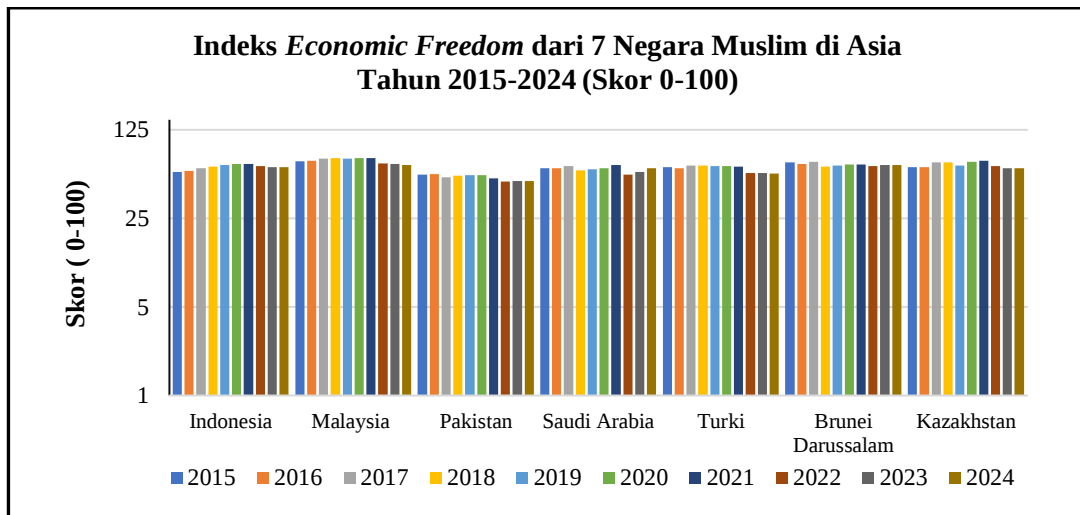
Indeks *economic freedom* disusun berdasarkan empat pilar utama, yaitu *rule of law*, *government size*, *regulatory efficiency*, dan *open markets*. Keempat pilar tersebut kemudian diuraikan ke dalam dua belas indikator, yaitu *property rights*, *judicial effectiveness*, *government integrity*, *tax burden*, *government spending*, *fiscal health*, *business freedom*, *labor freedom*, *monetary freedom*, *trade freedom*, *investment freedom*, dan *financial freedom*.

Indikator-indikator tersebut mencerminkan kondisi kelembagaan, kebijakan fiskal, efisiensi regulasi, serta tingkat keterbukaan ekonomi suatu

negara dalam mendukung aktivitas ekonomi dan investasi. Meskipun indeks ini tersusun dari beberapa pilar dan indikator, sejumlah penelitian terbaru tetap menggunakan skor rata-rata atau indeks agregat *economic freedom* sebagai proksi utama dalam analisis empiris karena dinilai mampu merepresentasikan tingkat kebebasan ekonomi secara menyeluruh, memudahkan perbandingan antarnegara, serta mengurangi kompleksitas model penelitian (Mawardi et al., 2024; Muhammad et al., 2024).

Dang & Trinh, 2025 menunjukkan bahwa *economic freedom* berpengaruh positif terhadap arus masuk investasi asing langsung (FDI) di negara-negara Asia Tenggara serta berkorelasi positif dengan kedalaman dan stabilitas perkembangan keuangan secara global. Mawardi et al. (2024) menunjukkan bahwa *economic freedom* berkontribusi signifikan terhadap perkembangan keuangan Islam di negara-negara OIC (*Organization of Islamic Cooperation*). Nabila et al. (2025) menunjukkan bahwa *economic freedom* dan pertumbuhan ekonomi memperkuat hubungan antara bank dan profitabilitas.

Masrizal et al. (2025) menemukan bahwa *economic freedom* memiliki pengaruh substansial terhadap profitabilitas bank Islam, khususnya melalui komponen kebebasan finansial dan kebebasan investasi. Hasil ini menunjukkan bahwa *economic freedom* tidak hanya memengaruhi persepsi investor secara umum, tetapi juga berkaitan dengan kinerja dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan Islam secara langsung. Gambar 1.5 dibawah ini menyajikan skor indeks *economic freedom* pada 7 negara Asia dalam rentang waktu 2015-2024.



Gambar 1.5 Indeks *Economic Freedom* dari 7 Negara Muslim di Asia Tahun 2015-2024 (Skor)

Sumber: Heritage Foundation 2015-2024 (data diolah)

Indeks *economic freedom* pada gambar 1.5 menunjukkan variasi indeks antarnegara, yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, mulai dari *mostly unfree* hingga *free*. Kategori *mostly unfree* menggambarkan tingkat kebebasan ekonomi suatu negara dengan skor *Index of Economic Freedom* berada pada rentang 50–59,9. Sementara itu, kategori *moderately free* menunjukkan negara dengan skor indeks antara 60–69,9 dan kategori *free* merepresentasikan negara dengan tingkat kebebasan ekonomi tertinggi, yaitu memiliki indeks pada kisaran skor 80–100 (H. Foundation, 2025).

Sejalan dengan klasifikasi tersebut, negara-negara yang berada pada kategori *mostly unfree* dan *moderately free* perlu melakukan berbagai upaya perbaikan, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan. Perbaikan tersebut meliputi penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan efisiensi birokrasi, serta penciptaan regulasi yang lebih kondusif guna mendukung aktivitas ekonomi dan dunia usaha. *Economic freedom* pada dasarnya membentuk fondasi institusional

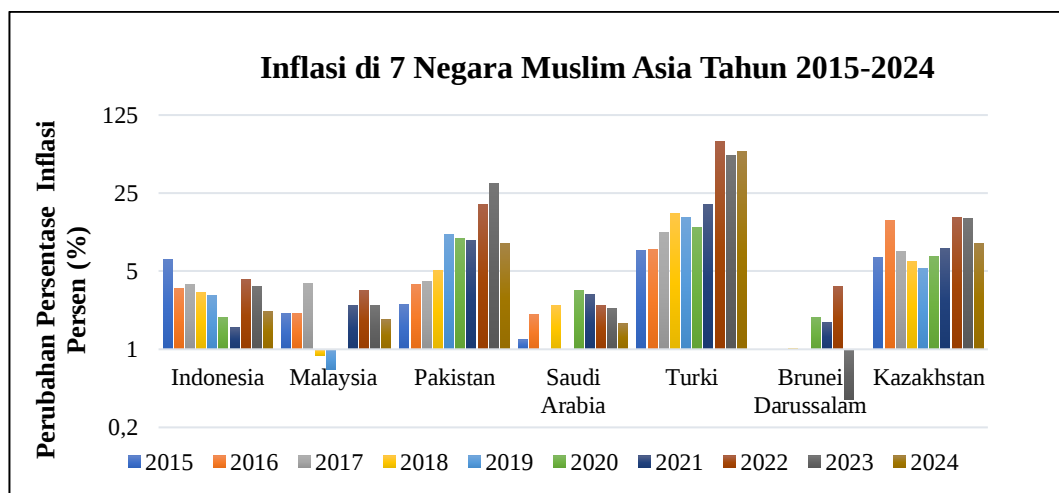
yang menentukan kualitas kebijakan, efisiensi pasar, serta kepercayaan pelaku usaha. Fondasi tersebut selanjutnya berperan penting dalam menciptakan *Macroeconomic Stability* sebagai cerminan ketahanan dan keberlanjutan perekonomian suatu negara (Dempere & Pauceanu, 2022; Thi et al., 2025)

Macroeconomic stability merupakan kondisi perekonomian yang menunjukkan kemampuan suatu negara dalam menjaga keseimbangan dan kesinambungan aktivitas ekonomi makro. Stabilitas ini tercermin dari terkendalinya variabel utama seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan *gross domestic product (GDP)*, yang berperan penting dalam menciptakan kepastian bagi pelaku ekonomi (Putri et al., 2023; D. Wibowo & Firmansyah, 2025). Kondisi ekonomi yang stabil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan investor, serta mendukung keberlanjutan sektor riil dan lembaga keuangan (Chernykh et al., 2019; Elsani et al., 2024). Stabilitas makro ekonomi dalam keuangan Islam menjadi kondisi pendukung utama bagi ekspansi lembaga, sebab kestabilan makroekonomi menciptakan ruang bagi lembaga keuangan Islam untuk menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dan berkelanjutan.

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas makroekonomi yang mengukur tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian, yang dihitung berdasarkan persentase perubahan indeks harga, seperti *Consumer Price Index (CPI)*. Inflasi mencerminkan tingkat stabilitas harga dan kondisi fundamental ekonomi, karena berkaitan dengan daya beli masyarakat, arah kebijakan moneter, serta kepercayaan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian. Inflasi yang terkendali menunjukkan iklim ekonomi yang stabil

dan kredibel, sedangkan inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menimbulkan ketidakpastian harga, menekan daya beli masyarakat, serta berdampak terhadap aktivitas investasi dan kinerja lembaga keuangan (Ahmad & Linge, 2024; Prayitno et al., 2025).

Batayneh et al. (2021), Berliandini & Hasmarini (2025) juga menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menghambat aliran investasi asing langsung (FDI) sehingga memperlambat perkembangan keuangan secara keseluruhan, termasuk mekanisme intermediasi keuangan seperti kredit bank. Gambar 1.6 dibawah ini menunjukkan tingkat inflasi pada tujuh negara Muslim di kawasan Asia yang menjadi objek penelitian.



Gambar 1.6 Perubahan Persentase Inflasi Tahunan di 7 Negara Muslim Asia Tahun 2015-2024 (Persen %)

Sumber: World Bank 2015-2024 (data diolah)

Pada Gambar 1.6 menunjukkan bahwa setiap negara memiliki inflasi yang berbeda-beda, Indonesia dan Malaysia menunjukkan inflasi yang terkendali, dengan Indonesia turun dari 6,39% (2015) menjadi 3,66% (2024), sementara Malaysia berada pada kisaran 0,66% hingga 3,87% dan sempat mengalami deflasi

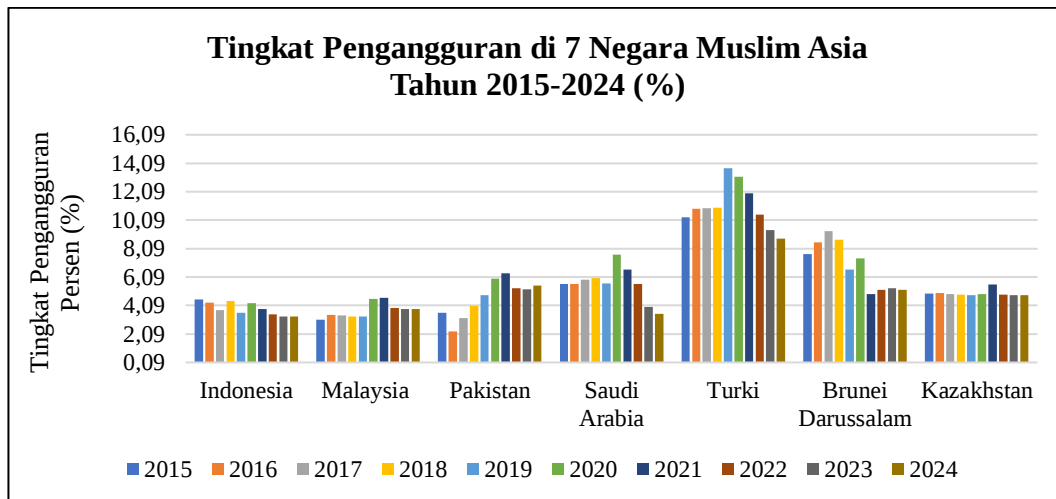
-1,13% (2020). Sebaliknya, Pakistan dan Turki mengalami lonjakan tajam, di mana Pakistan meningkat hingga 30,77% (2024) dan Turki mencapai 72,31% (2022) sebelum turun ke 53,86% (2024). Kazakhstan juga mengalami fluktuasi signifikan dengan inflasi mencapai 15,03% (2022) dan 14,72% (2024), sedangkan Arab Saudi dan Brunei Darussalam tergolong rendah dan stabil di bawah 4% pada sebagian besar periode.

Semakin tinggi inflasi, semakin besar tekanan terhadap perekonomian karena kenaikan harga menurunkan daya beli, meningkatkan biaya produksi, dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha serta investor, sehingga berpotensi menghambat investasi, pembiayaan, dan kinerja sektor riil (Ha & So, 2023; Laurila & Ilomäki, 2020). Sebaliknya, inflasi yang rendah dan terkendali mencerminkan stabilitas ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan perkembangan keuangan, termasuk keuangan Islam (M. Wibowo, 2025; Widya et al., 2023).

Selain inflasi, tingkat pengangguran (*unemployment*) merupakan indikator makroekonomi yang mengukur proporsi tenaga kerja yang tidak terserap dalam kegiatan produktif meskipun memiliki kemampuan dan keinginan untuk bekerja. Tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang dapat berdampak luas terhadap perekonomian, termasuk penurunan pendapatan rumah tangga, melemahnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya beban perekonomian dan beban pemerintah (Hurrin & Yazid, 2025). Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan.

Nursiyono & Dewi, 2022 menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga dan berkurangnya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kemiskinan. Blanchard & F.Katz (1997) dan Okun (1962) juga menegaskan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi berkorelasi dengan rendahnya pertumbuhan output dan inefisiensi pasar tenaga kerja. Dalam perkembangan keuangan, tingginya tingkat pengangguran dapat menurunkan kemampuan masyarakat dalam menghimpun dana dan mengakses pembiayaan, sehingga melemahkan fungsi intermediasi keuangan (Beck et al., 2007). Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki keterkaitan dengan perkembangan aset perbankan syariah.

Pengangguran yang meningkat dapat memengaruhi kemampuan perbankan syariah dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan secara optimal. Sebaliknya, kondisi pasar tenaga kerja yang lebih baik cenderung mendorong peningkatan aktivitas intermediasi keuangan, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. Oleh karena itu, tingkat pengangguran sering digunakan sebagai salah satu indikator makroekonomi yang diperkirakan dapat memengaruhi kinerja dan perkembangan industri perbankan syariah. (Elina, 2024; Thoyyibah et al., 2024). Gambar 1.7 dibawah ini menunjukkan tingkat pengangguran pada tujuh negara Muslim di kawasan Asia yang menjadi objek penelitian.



Gambar 1.7 Tingkat Pengangguran di 7 Negara Muslim Asia Tahun 2015-2024 (%)

Sumber: World Bank 2015-2024 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.7, terlihat bahwa tingkat pengangguran di tujuh negara Muslim Asia selama periode 2015–2024 menunjukkan pola yang beragam antarnegara dan antarwaktu. Turki secara konsisten mencatat tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan negara lain, dengan kecenderungan meningkat tajam pada periode 2018–2021 sebelum mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini mencerminkan tekanan pada pasar tenaga kerja Turki yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dan ketidakstabilan makroekonomi. Sementara itu, Pakistan dan Arab Saudi menunjukkan fluktuasi tingkat pengangguran yang cukup signifikan, terutama pada periode menjelang dan selama COVID-19, yang mengindikasikan sensitivitas pasar tenaga kerja terhadap guncangan ekonomi global.

Di sisi lain, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Kazakhstan menunjukkan tingkat pengangguran yang lebih stabil dengan variasi yang lebih moderat sepanjang periode pengamatan. Indonesia dan Malaysia mengalami

peningkatan pengangguran pada periode 2020–2021 akibat dampak Covid-19, namun cenderung menurun setelahnya seiring dengan pemulihan ekonomi. Brunei Darussalam dan Kazakhstan mencatat tingkat pengangguran yang rendah dan stabil, mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang lebih terkendali. Secara keseluruhan, tingkat pengangguran sebagai stabilitas makroekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik dan dinamika ekonomi global, serta berpotensi berdampak pada kinerja sektor riil dan lembaga keuangan di masing-masing negara.

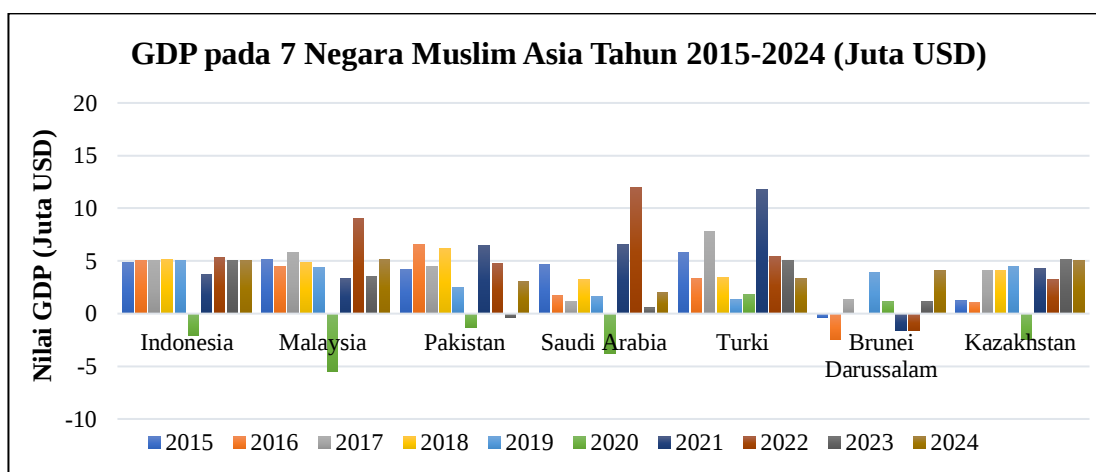
Selain inflasi dan tingkat pengangguran, stabilitas ekonomi juga ditinjau dari *Gross Domestic Product* (GDP). GDP merupakan salah satu indikator utama dalam menilai stabilitas ekonomi suatu negara karena mencerminkan tingkat aktivitas dan kapasitas produksi perekonomian secara keseluruhan. Stabilitas pertumbuhan GDP berperan penting dalam menciptakan kepastian ekonomi dan meningkatkan pendapatan serta daya beli masyarakat, yang pada akhirnya mendorong permintaan terhadap layanan keuangan dan pembiayaan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terbukti mendorong kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan (*demand-following hypothesis*) dan memperkuat intermediasi keuangan (Ambariyanto et al., 2024; Sasana et al., 2020). Sementara kontribusi keuangan terhadap pertumbuhan makro turut meningkatkan konsumsi dan daya beli dalam perekonomian (Permana et al., 2025).

Pertumbuhan GDP yang stabil mencerminkan iklim makroekonomi yang kondusif dan memberikan ruang bagi lembaga keuangan Islam untuk meningkatkan pembiayaan sektor produktif dan akumulasi aset secara berkelanjutan karena ekspansi ekonomi yang terkendali menciptakan lingkungan

usaha yang stabil dan menurunkan risiko pembiayaan. Sunaryo & Kasri, (2022) menunjukkan kontribusi signifikan keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan pengembangan perbankan Islam dan lembaga keuangan Islam telah terbukti berdampak positif terhadap GDP dalam jangka panjang.

Selain itu, hasil penelitian Abduh & Omar, (2012) dan Hamadou (2022) menunjukkan bahwa kedalaman serta pembiayaan keuangan Islam berkorelasi positif dengan pertumbuhan GDP, di mana peningkatan *Islamic financial depth* dan intermediasi keuangan Islam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam. Gambar 1.8 dibawah ini menunjukkan nilai *Gross Domestic Product* pada tujuh negara Muslim di kawasan Asia yang menjadi objek penelitian.



Gambar 1.8 GDP 7 Negara Muslim Asia Tahun 2015-2024 (Jutan USD)

Sumber: World Bank 2015-2024 (data diolah)

Gambar 1.8 menunjukkan perkembangan GDP tujuh negara Muslim di Asia selama periode 2015–2024. Secara umum, seluruh negara mengalami fluktuasi pertumbuhan GDP yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global dan kondisi domestik. Indonesia dan Malaysia menunjukkan pertumbuhan yang stabil sepanjang periode pengamatan, meskipun sempat mengalami perlambatan pada

tahun 2020 akibat COVID-19. Arab Saudi dan Turki memperlihatkan volatilitas yang lebih tinggi, dengan penurunan tajam pada periode tertentu dan pemulihan yang signifikan pada tahun-tahun setelahnya. Sementara itu, Brunei Darussalam dan Kazakhstan menunjukkan nilai GDP yang lebih kecil dan cenderung berfluktuatif, mencerminkan struktur ekonomi yang lebih terbatas dan ketergantungan pada sektor tertentu.

Meskipun stabilitas ekonomi mencerminkan kondisi makroekonomi yang kondusif bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi dan keuangan, stabilitas tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kualitas institusi yang memadai. Stabilitas inflasi, tingkat pengangguran yang terkendali, serta pertumbuhan GDP yang stabil memerlukan kerangka kelembagaan yang kuat agar kebijakan ekonomi dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara konsisten serta berkelanjutan. Dalam hal ini, *institutional quality* berperan sebagai fondasi yang memastikan efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi lembaga keuangan dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi.

Kualitas institusi (*institutional quality*) merupakan salah satu determinan fundamental dalam pembangunan ekonomi karena mencerminkan efektivitas sistem hukum, tata kelola pemerintahan, serta kapasitas regulasi dalam menciptakan stabilitas dan kepastian bagi aktivitas ekonomi dan keuangan (World Bank, 2025). Dalam literatur empiris terbaru, kualitas institusi dipahami sebagai kerangka tata kelola yang mencakup perlindungan hak kepemilikan, efektivitas kebijakan publik, serta kemampuan pemerintah dalam menyediakan regulasi dan layanan publik yang efisien untuk mendukung kegiatan ekonomi.

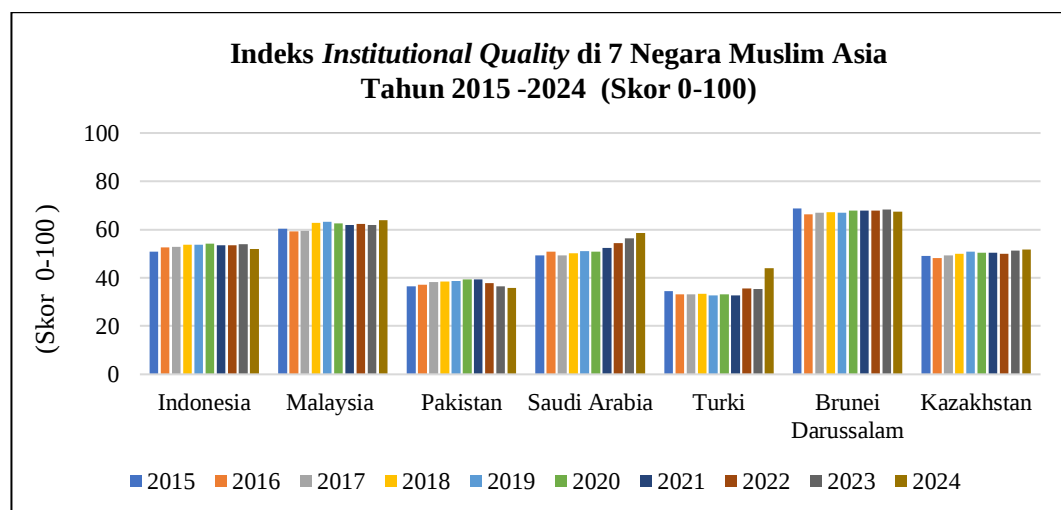
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa institusi yang efektif dan tata kelola yang baik berperan penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat kinerja sektor keuangan dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (Entezari et al., 2024; Zhao et al., 2024; Khan et al., 2024). Dalam praktik pengukurannya, kualitas institusi umumnya merujuk pada indikator Worldwide Governance Indicators yang dikembangkan oleh World Bank, yang terdiri dari enam dimensi utama, yaitu *voice and accountability*, *political stability and absence of violence*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption*.

Keenam indikator tersebut merepresentasikan sejauh mana pemerintah mampu menjalankan fungsi regulasi secara efektif, menegakkan hukum, menjaga stabilitas politik, serta mengendalikan praktik korupsi, sehingga menciptakan lingkungan institusional yang kondusif bagi perkembangan sektor keuangan dan aktivitas ekonomi. Meskipun indikator kualitas institusi tersusun atas beberapa dimensi, sejumlah penelitian terdahulu tetap menggunakan nilai rata-rata atau indeks agregat sebagai proksi utama kualitas institusi. Pendekatan ini digunakan karena dinilai lebih mampu merepresentasikan kualitas kelembagaan secara menyeluruh dibandingkan melihat masing-masing indikator secara terpisah (Igyo, 2025; Law & Azman-Saini, 2012; Muhammad et al., 2024; Thi et al., 2025)

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Beck et al. (2001) yang menunjukkan bahwa kualitas institusi berpengaruh signifikan terhadap kinerja fungsi intermediasi keuangan, khususnya dalam meningkatkan kemampuan lembaga keuangan dalam menyalurkan dana ke sektor produktif secara efisien dan

berkelanjutan. Institusi yang efektif juga memungkinkan kebijakan fiskal dan moneter dijalankan secara konsisten, sehingga mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Acemoglu et al. (2004) menegaskan bahwa institusi yang inklusif dan kredibel berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dengan menekan ketidakpastian, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat kepercayaan investor dan pelaku usaha.

Muhammad et al. (2024) menemukan bahwa *institutional quality* yang tercermin dari efektivitas pemerintahan, supremasi hukum, dan pengendalian korupsi berperan signifikan dalam mendorong perkembangan keuangan Islam dengan menciptakan lingkungan regulasi yang stabil, meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, serta memperkuat fungsi intermediasi lembaga keuangan Islam. Institutional quality pada tujuh negara Asia yang menjadi objek penelitian disajikan pada Gambar 1.9.



Gambar 1.9 Indeks Institutional Quality di 7 Negara Muslim Asia Tahun 2015-2024 (Skor 0-100)

Sumber: World Bank 2015-2024 (data diolah)

Pada Gambar 1.9 terlihat bahwa skor *institutional quality* bervariasi antar negara, yang mengindikasikan adanya perbedaan kapasitas kelembagaan masing-masing negara. Nilai *institutional quality* disajikan dalam indeks 0–100, di mana angka yang lebih tinggi mencerminkan efektivitas regulasi, supremasi hukum, stabilitas politik, dan pengendalian korupsi yang lebih kuat. Semakin tinggi nilainya, semakin besar kapasitas institusi dalam mendukung efektivitas kebijakan ekonomi dan stabilitas lembaga keuangan, sehingga berimplikasi positif terhadap keberlanjutan serta daya saing lembaga keuangan Islam. Oleh karena itu, *institutional quality* tidak hanya berfungsi sebagai fondasi pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai determinan penting dalam optimalisasi pertumbuhan dan akumulasi aset keuangan Islam di suatu negara.

Di tengah dinamika perekonomian global, negara-negara muslim semakin memperkuat lembaga keuangan Islam sebagai institusi penting dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan stabilitas ekonomi. Keuangan Islam tidak lagi dipandang sekadar sebagai alternatif bagi sistem keuangan konvensional, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari pesatnya perkembangan perbankan syariah, pasar modal Islam, serta instrumen sukuk di berbagai negara muslim, yang didukung oleh peningkatan regulasi, inovasi produk, serta partisipasi investor domestik maupun global.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perkembangan lembaga keuangan Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi, tingkat kebebasan ekonomi, serta kualitas institusi yang membentuk lingkungan ekonomi suatu negara. Dari perspektif kebebasan ekonomi, beberapa penelitian

menunjukkan bahwa *economic freedom* berperan penting dalam meningkatkan kinerja lembaga keuangan. Masrizal et al. (2025) menemukan bahwa *economic freedom* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank syariah karena lingkungan ekonomi yang lebih bebas mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas intermediasi lembaga keuangan. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Abbas et al. (2024) yang menyatakan bahwa kebebasan investasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan.

Selain itu, Lucky & Endraswati (2024) menemukan adanya hubungan jangka panjang antara *economic freedom* dan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Lembaga keuangan. Namun demikian, Styawati & Meylianingrum (2025) menunjukkan bahwa *economic freedom* dan tata kelola tidak selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan, sehingga hasil penelitian terkait pengaruh kebebasan ekonomi masih menunjukkan variasi.

Selain kebebasan ekonomi, stabilitas ekonomi makro juga menjadi determinan penting dalam perkembangan keuangan. Penelitian Kurniawan et al. (2025) menunjukkan bahwa indikator makroekonomi seperti inflasi, suku bunga kebijakan, dan nilai tukar berpengaruh terhadap profitabilitas bank di Indonesia. Temuan ini diperkuat oleh Hussain & Zuhri (2025) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan karena meningkatnya pengangguran dapat menurunkan permintaan kredit serta meningkatkan risiko pembiayaan.

Selain itu, Nasir & Syuib (2021) juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan dengan pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga kondisi pasar tenaga kerja turut memengaruhi perkembangan keuangan. Sementara itu, Hadi et al. (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui GDP memiliki hubungan positif dengan perkembangan keuangan Islam. Peningkatan aktivitas ekonomi dapat mendorong ekspansi dan pembiayaan perbankan, sehingga memperkuat peran lembaga keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi makro merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan lembaga keuangan.

Di samping stabilitas ekonomi, kualitas institusi juga memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan keuangan. Mawardi et al. (2024) menemukan bahwa *institutional quality* dan *economic freedom* berpengaruh positif terhadap *Islamic Financial Development* di negara-negara anggota OIC. Penelitian Muhammad et al. (2024) juga menunjukkan bahwa kualitas institusi, seperti efektivitas pemerintahan dan kepastian regulasi, berpengaruh positif terhadap perkembangan keuangan Islam. Selanjutnya, Igyo (2025) menemukan bahwa kualitas institusi mampu memperkuat hubungan antara keuangan dan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa institusi yang kuat dapat meningkatkan efektivitas lembaga keuangan dalam mendukung aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, **terdapat gap penelitian** dalam literatur yang ada, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menganalisis pengaruh kebebasan ekonomi, kondisi makroekonomi, dan kualitas institusi secara terpisah atau lebih banyak berfokus pada sektor perbankan secara umum.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, **kebaruan (novelty)** penelitian ini terletak pada beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan secara simultan tiga determinan utama, yaitu *Economic Freedom*, *Macroeconomic Stability*, dan *Institutional Quality* dalam satu kerangka empiris untuk menjelaskan perkembangan keuangan islam. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroiti salah satu faktor secara terpisah.

Kedua, penelitian ini menggunakan indikator *Islamic Financial Development* dari total asset gabungan lembaga perbankan dan lembaga sejenis yang menawarkan jasa keuangan Islam, yang mencakup seluruh lembaga keuangan dan non-keuangan, baik yang dikendalikan domestik maupun asing, sebagai variabel dependen yang bersifat lebih komprehensif. Pendekatan ini mampu merepresentasikan perkembangan lembaga keuangan Islam secara lebih menyeluruh dibandingkan penggunaan indikator parsial, seperti profitabilitas, aset perbankan, atau pembiayaan perbankan saja.

Ketiga, penelitian ini berfokus pada negara-negara Muslim di Asia yang memiliki karakteristik kelembagaan serta dinamika makroekonomi yang beragam. Meskipun wilayah ini merupakan pusat pertumbuhan keuangan Islam global, kajian empiris yang mengkaji secara simultan hubungan antara kebebasan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan kualitas kelembagaan terhadap perkembangan keuangan Islam masih sangat terbatas.

Keempat, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dari sisi kebijakan serta literatur rujukan dengan menunjukkan bahwa perkembangan keuangan tidak hanya ditentukan oleh permintaan pasar, tetapi juga dipengaruhi

oleh kualitas lingkungan ekonomi dan kelembagaan. Penelitian ini sekaligus melanjutkan pemikiran Levine (2005) dengan menguji determinan perkembangan sektor keuangan secara lebih spesifik pada industri keuangan Islam yang hingga saat ini masih relatif terbatas dalam kajian empiris.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap perkembangan keuangan islam guna memberikan pemahaman empiris yang lebih mendalam dengan judul:

“Pengaruh Indeks *Economic Freedom*, *Macroeconomic Stability*, Dan Indeks *Institutional Quality* Terhadap *Islamic Financial Development* (Studi Kasus Pada Negara Muslim di Kawasan Asia)

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Indeks Economic Freedom* Berpengaruh Terhadap *Islamic Financial Development* ?
2. Apakah Inflasi Berpengaruh Terhadap *Islamic Financial Development* ?
3. Apakah Pengangguran Berpengaruh Terhadap *Islamic Financial Development* ?
4. Apakah *Gross Domestic Product* Berpengaruh Terhadap *Islamic Financial Development* ?
5. Apakah Indeks *Institutional Quality* Berpengaruh Terhadap *Islamic Financial Development* ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Indeks *Economic Freedom* Terhadap *Islamic Financial Development*
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Inflasi Terhadap *Islamic Financial Development*
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Pengangguran Terhadap *Islamic Financial Development*
4. Untuk Menganalisis Pengaruh *Gross Domestic Product* Terhadap *Islamic Financial Development*
5. Untuk Menganalisis Pengaruh Indeks *Intitutional Quality* Terhadap *Islamic Financial Development*

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang memengaruhi *Islamic Financial Development* pada 7 negara di Kawasan Asia yang tergabung pada *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) dengan jumlah populasi muslim terbanyak serta aktif mengembangkan lembaga keuangan Islam, yaitu Indonesia, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Turki, Brunei Darussalam, dan Kazakhstan. Variabel dalam penelitian ini meliputi *economic freedom*, *macroeconomic stability* yang terdiri dari inflasi, tingkat pengangguran, dan *Gross Domestic Product*, serta indeks *institutional quality*, sedangkan variabel dependen adalah *Islamic Financial Development*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel selama periode sepuluh tahun dari 2015-2024, sehingga memungkinkan analisis dinamika perkembangan keuangan Islam antarnegara dan antarwaktu. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang

bersumber dari lembaga internasional yang kredibel, antara lain *Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries* (SESRIC) untuk data *Islamic financial development*, *Heritage Foundation* untuk indeks *economic freedom*, *World Bank* untuk data *macroeconomic stability*, serta *Worldwide Governance Indicators* (WGI) untuk indeks *institutional quality*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai faktor yang memengaruhi *Islamic Financial Development*, khususnya peran *economic freedom*, *macroeconomic stability*, dan *institutional quality* di negara-negara muslim Kawasan Asia.
2. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur akademik di bidang ekonomi dan keuangan Islam, khususnya terkait determinan perkembangan keuangan Islam di Asia.
3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan empiris dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan keuangan Islam yang lebih inklusif, stabil, dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas institusi, menciptakan iklim kebebasan ekonomi yang kondusif, serta mengelola ketidakpastian ekonomi guna mendorong perkembangan keuangan Islam.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, sumber referensi, dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji *Islamic Financial Development* maupun variabel terkait,

seperti *economic freedom*, *macroeconomic stability*, & *institutional quality*, baik dengan cakupan wilayah, periode waktu atau metodologis yang berbeda.